



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 337 /KMA/SK/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PERESMIAN OPERASIONAL  
TIGA BELAS PENGADILAN TINGKAT BANDING BARU  
DAN TIGA PULUH DELAPAN GEDUNG PENGADILAN  
TINGKAT PERTAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 perihal pembentukan 13 (tiga belas) pengadilan tingkat banding yang baru, perlu ditetapkan tanggal dan tempat peresmiannya;
  - b. bahwa dalam rangka pemerataan penyelenggaraan layanan peradilan dan peningkatan layanan hukum kepada masyarakat perlu dilaksanakan peresmian 38 (tiga puluh delapan) gedung pengadilan yang baru dibangun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding Baru dan 38 (tiga puluh delapan) Gedung Pengadilan Tingkat Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat,



- Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;
  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PERESMIAN OPERASIONAL TIGA BELAS PENGADILAN TINGKAT BANDING BARU DAN TIGA PULUH DELAPAN GEDUNG PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.



- KESATU : Menetapkan peresmian operasional 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding yang baru dan 38 (tiga puluh delapan) Gedung Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 5 Desember 2022 bertempat di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Menetapkan daftar 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding yang baru dan 38 (tiga puluh delapan) Gedung Pengadilan Tingkat Pertama yang akan diresmikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 November 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
  2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
  3. Menteri Keuangan RI;
  4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan;
  5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
  6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
  7. Para Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 337 /KMA/SK/XI/2022  
TANGGAL : 24 November 2022

DAFTAR PENGADILAN TINGKAT BANDING  
YANG AKAN DIRESMIKAN OPERASIONALNYA

NO	PENGADILAN TINGKAT BANDING	DAERAH HUKUM
A	LINGKUNGAN PERADILAN UMUM	
1	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Provinsi Papua Barat
2	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
3	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
4	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
B	LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	
1	Pengadilan Tinggi Agama Bali	Provinsi Bali
2	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	Provinsi Papua Barat
3	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
4	Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
5	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
C	LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	1 Provinsi Sumatera Selatan 2 Provinsi Jambi 3 Provinsi Bengkulu 4 Provinsi Lampung 5 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin	1 Provinsi Kalimantan Selatan 2 Provinsi Kalimantan Tengah 3 Provinsi Kalimantan Timur 4 Provinsi Kalimantan Barat 5 Provinsi Kalimantan Utara
3	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	1 Provinsi Bali 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	1 Provinsi Sulawesi Utara 2 Provinsi Gorontalo 3 Provinsi Maluku 4 Provinsi Maluku Utara 5 Provinsi Papua 6 Provinsi Papua Barat

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 337 /KMA/SK/XI/2022  
TANGGAL : 24 November 2022

DAFTAR PENGADILAN TINGKAT PERTAMA  
YANG AKAN DIRESMIKAN GEDUNG PENGADILANNYA

NO	PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	KELAS	WILAYAH HUKUM
A	LINGKUNGAN PERADILAN UMUM		
1	Pengadilan Negeri Cikarang	II	Pengadilan Tinggi Bandung
2	Pengadilan Negeri Blangpidie	II	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3	Pengadilan Negeri Suka Makmue	II	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
4	Pengadilan Negeri Sei Rampah	II	Pengadilan Tinggi Medan
5	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	II	Pengadilan Tinggi Padang
6	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
7	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	II	Pengadilan Tinggi Palembang
8	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	II	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
9	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	II	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
10	Pengadilan Negeri Penajam	II	Pengadilan Tinggi Samarinda
11	Pengadilan Negeri Melonguane	II	Pengadilan Tinggi Manado
12	Pengadilan Negeri Belopa	II	Pengadilan Tinggi Makassar
13	Pengadilan Negeri Lasusua	II	Pengadilan Tinggi Kendari
14	Pengadilan Negeri Namlea	II	Pengadilan Tinggi Ambon
15	Pengadilan Negeri Mukomuko	II	Pengadilan Tinggi Bengkulu
16	Pengadilan Negeri Koba	II	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
17	Pengadilan Negeri Mentok	II	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
B	LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA		
1	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	II	Mahkamah Syar'iyah Aceh

2	Pengadilan Agama Sei Rampah	II	Pengadilan Tinggi Agama Medan
3	Pengadilan Agama Pulau Punjung	II	Pengadilan Tinggi Agama Padang
4	Pengadilan Agama Prabumulih	II	Pengadilan Tinggi Agama Palembang
5	Pengadilan Agama Pringsewu	II	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
6	Pengadilan Agama Mesuji	II	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
7	Pengadilan Agama Sukadana	II	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
8	Pengadilan Agama Penajam	II	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
9	Pengadilan Agama Lolak	II	Pengadilan Tinggi Agama Manado
10	Pengadilan Agama Ampana	II	Pengadilan Tinggi Agama Palu
11	Pengadilan Agama Belopa	II	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
12	Pengadilan Agama Malili	II	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
13	Pengadilan Agama Lasusua	II	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
14	Pengadilan Agama Namlea	II	Pengadilan Tinggi Agama Ambon
15	Pengadilan Agama Kepahiang	II	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
16	Pengadilan Agama Suwawa	II	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
C	LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	I B	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
D	RENOVASI GEDUNG		
1	Pengadilan Negeri Sungguminasa	I A	Pengadilan Tinggi Makassar
2	Pengadilan Negeri Marabahan	II	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
3	Pengadilan Agama Bajawa	II	Pengadilan Tinggi Agama Kupang
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Khusus	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN